

**ANALISIS PENERAPAN STANDAR AKUNTASI PEMERINTAH
TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALEMBANG**

SKRIPSI



Disusun Oleh

Nama : Rika Meidiyati
NIM : 222013114

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
2019**

SKRIPSI

ANALISIS PENERAPAN STANDAR AKUNTASI PEMERINTAH TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALEMBANG

**Diajukan untuk Memenuhi Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi**



Nama : Rika Meidiyati

NIM : 222013114

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
2019**

Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah
Palembang

TANDA PENGESAHAN SKRIPSI

Judul : Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi
Pemerintah terhadap Kualitas Laporan
Keuangan Sekretariat KPU Kota Palembang
Nama : Rika Meidiyati
NIM : 222013114
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Jurusan : Akuntansi
Mata Kuliah Pokok : Akuntansi Sektor Publik

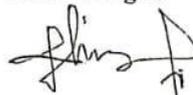
Diterima dan Disyahkan
Pada Tanggal Juli 2019

Pembimbing I



Dr. Sa'adah Siddik, S.E., AK., M.Si., AC.
NIDN/NBM :0002095507/972321

Pembimbing II



Nina Sabrina, S.E., M.Si.
NIDN/NBM :0216056801/85119

Mengetahui
Dekan
Kepala Program Studi Akuntansi



Betris, S.E., AK, M.Si, CA
NIDN :0216106902/944806



Scanned with
CamScanner

PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Rika Meidiyati**
NIM : 2220103114
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Program Studi : Akuntansi

Menyatakan bahwa skripsi ini ditulis sendiri dengan sungguh- sungguh dan tidak ada bagian yang merupakan penjiplakan karya orang lain. Apabila terbukti di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya sanggup menerima sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Palembang, Juli 2019
Yang Menyatakan,



Rika Meidiyati



Scanned with
CamScanner

ABSTRAK

Rika Meidiyati/22.2013.114/ Analisis Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Palembang

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan standar akuntansi pemerintah terhadap kualitas laporan keuangan pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Palembang. Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian eskploratif. Subjek penelitian ini adalah Pegawai Bidang keuangan, umum dan logistik Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Palembang yang berjumlah 18 pegawai. Data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data primer. Pengumpulan data menggunakan kuesioner dengan analisis data kuantitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan standar akuntansi pemerintah mempunyai pengaruh positif secara signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Palembang. Besar pengaruh sebesar 91,2%, sedangkan sisanya 8,8% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

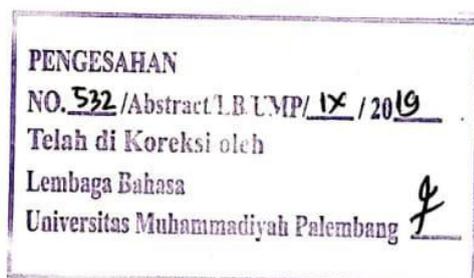
Kata Kunci : Standar Akuntansi Pemerintah, Kualitas Laporan Keuangan

Abstract

Rika Meidiyati / 22.2013.114 / The Analysis of the Government Accounting Standards Application to the Quality of the Financial Statements of the Secretariat of the KPU Palembang.

The objective of this study was to determine the Government Accounting Standards Application to the Quality of the Financial Statements of the Secretariat of the KPU Palembang. This study was explorative research. The subjects of this study were 18 employees in the financial, general and logistical division of the Secretariat of the KPU Palembang. The data needed in this study was primary data. The data collection was a questionnaire with quantitative data analysis. The results of this study indicated that the application of government accounting standards gave a significant positive effect on the quality of financial reports at the Secretariat of the KPU Palembang. The influence was 91.2%, while the remaining 8.8% was influenced by other variables not examined in this study.

Keywords: government accounting standards, quality of financial statements



Scanned with
CamScanner

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatulahi Wabarokatuh

Puji dan syukur alhamdulillah penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang melimpahkan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat dan para pengikutnya yang kita harapkan syafa'anya di dunia dan di akherat. Skripsi ini yang berjudul **“Analisis Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Palembang”** disusun untuk memenuhi salah satu syarat menempuh ujian skripsi guna mencapai Sarjana Ekonomi pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang.

Kualitas laporan keuangan penting karena salah satu bentuk tata kelola pemerintahan yang baik. Laporan keuangan yang berkualitas dapat memberikan manfaat dalam upaya mengambil kebijakan suatu pemerintahan di masa yang akan datang. Oleh karena itu, maka semakin baik penerapan standar akuntansi pemerintahan maka kualitas laporan keuangan juga akan semakin meningkat. Karena standar Akuntansi Pemerintahan sebagai pedoman penyajian laporan keuangan dalam mewujudkan akuntabilitas dan tranparansi pengelolaan keuangan Negara.

Penulisan laporan ini tentu tidak akan selesai tanpa dorongan dan dukungan banyak pihak. Penulis sampaikan terima kasih terutama kepada suami tercinta (M. Azharullah) dan kedua orang tuaku (Achmad (alm) dan Suryati) yang telah menjaga dan memberikan dukungan selama ini dan berkat kasih sayang dan nasehat demi nasehat dari mereka sehingga penulis mampu sampai ke tahap akhir penyusunan skripsi ini. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Ibu Dr. Sa'adah Siddik, S.E., AK., M.Si., AC., dan Ibu Nina Sabrina, S.E., M.Si.. selaku pembimbing dalam penyusunan skripsi ini. Selain itu, penulis juga mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Abid Djazuli, S.E., M.M., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Bapak Drs. H. Fauzi Ridwan, M.M., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Bapak Betri, S.E., Ak., M.Si., CA., dan Ibu Nina Sabrina, S.E., M.Si., selaku Ketua dan Sekretaris Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Bapak dan dosen serta staf pengajar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang.
5. Seluruh pegawai dan Staf Sekretariat KPU Kota Palembang yang sudah membantu dalam pengumpulan data skripsi ini.
6. Pihak-pihak lain yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Semoga Allah SWT membalas budi baik untuk seluruh membantu yang diberikan guna menyelesaikan skripsi ini. Penulis menyadari, meskipun banyak

usaha telah penulis lakukan, akan tetapi skripsi ini masih jauh dari sempurna.

Meskipun demikian mudah-mudahan memberikan manfaat dari skripsi ini.

Palembang, September 2019

Penulis,

Rika Meidiyati

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT	ii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN DAN MOTTO.....	iv
HALAMAN PRAKATA	v
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
ABSTRAK	xiv
ABSTRACT	xv
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	6
BAB II. KAJIAN PUSTAKA	7
A. Landasan Teori.....	7
1. Kualitas Laporan Keuangan	7
2. Standar Akuntansi Pemerintah.....	15
B. Penelitian Sebelumnya	20
C. Kerangka Pemikiran.....	23
D. Hipotesis Penelitian	23
BAB III. METODE PENELITIAN.....	24
A. Jenis Penelitian	24
B. Lokasi Penelitian	24
C. Operasionalisasi Variabel Penelitian.....	25
D. Subjek Penelitian	26
E. Data yang Diperlukan	26
F. Metode Pengumpulan Data	26
G. Analisis dan Teknik Analisis Data	27
BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	32
A. Hasil Penelitian.....	i
B. Pembahasan.....	32

1. Gambaran Umum Sekretariat KPU Kota Palembang.....	32
2. Analisis Validitas dan Realibilitas.....	36
3. Analisis Deskriptif.....	39
4. Analisis Hipotesis.....	67
B. Pembahasan.....	68
BAB V. SIMPULAN DAN SARAN.....	72
A. Simpulan.....	72
B. Saran.....	72
DAFTAR PUSTAKA.....	73
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel III.1	Operasionalisasi Variabel 25
Tabel IV.1	Hasil Uji Validitas Standar Akuntansi Pemerintah (X)..... 37
Tabel IV.2	Hasil Uji Validitas Kualitas Laporan Keuangan (Y)..... 38
Tabel IV.3.	Hasil Uji Reliabilitas..... 39
Tabel IV.4 .	Distribusi Frekuensi Jenis Kelamin Responden 40
Tabel IV.5.	Distribusi Frekuensi Pendidikan Terakhir Responden 41
Tabel IV.6.	Distribusi Frekuensi Menerapkan Basis AkruaI 41
Tabel IV.7.	Distribusi Frekuensi Penyajian Sesuai dengan Peraturan..... 42
Tabel IV.8.	Distribusi Frekuensi Pengakuan Anggaran 43
Tabel IV.9.	Distribusi Frekuensi Penyajian Laporan Realisasi Anggaran 43
Tabel IV.10.	Distribusi Frekuensi Penyusunan Laporan Arus Kas Sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah 44
Tabel IV.11.	Distribusi Frekuensi Laporan Arus Kas Menyajikan Informasi Periode Akuntansi 44
Tabel IV.12.	Distribusi Frekuensi Penyusunan Catatan Atas Laporan Keuangan..... 45
Tabel IV.13.	Distribusi Frekuensi Catatan Atas Laporan Keuangan Menjelaskan Pos-Pos Laporan Keuangan..... 46
Tabel IV.15.	Distribusi Frekuensi Pengukuran Persediaan Mempunyai Nilai yang Diukur Secara Andal 46
Tabel IV.16.	Distribusi Frekuensi Pencatatan Persediaan 47
Tabel IV.17.	Distribusi Frekuensi Klasifikasi Investasi 47
Tabel IV.18.	Distribusi Frekuensi Penggunaan Metode Nilai Bersih..... 48
Tabel IV.19.	Distribusi Frekuensi Aset Tetap Berdasarkan Sifat atau Fungsinya dalam Operasi Entitas 49
Tabel IV.20.	Distribusi Frekuensi Aset Tetap Dinilai Menggunakan Biaya Perolehan 49
Tabel IV.21.	Distribusi Frekuensi Kontruksi dalam Pengerjaan Disertai Biaya Perolehan 50

Tabel IV.22. Distribusi Frekuensi Memindahkan Konstruksi dalam Pengerjaan ke Asset Tetap	50
Tabel IV.23. Distribusi Frekuensi Mengakui Kewajiban	51
Tabel IV.24. Distribusi Frekuensi Kewajiban Dicatat Sebesar Nilai Norman	52
Tabel IV.24. Distribusi Frekuensi Pembetulan Pos-Pos	52
Tabel IV.25. Distribusi Frekuensi Melakukan Koreksi Kesalahan.....	53
Tabel IV.26. Distribusi Frekuensi Laporan Keuangan Konsolidasi Mencakup Semua Laporan Keuangan.....	53
Tabel IV.27. Distribusi Frekuensi Laporan Keuangan Konsolidasi Berisi Jumlah Komparatif dengan Periode Sebelumnya	54
Tabel IV.28. Distribusi Frekuensi Penyajian Laporan Operasional Minimal Sekali dalam Setahun.....	55
Tabel IV.29. Distribusi Frekuensi Penyusunan Laporan Operasional Berbasis AkruaI	55
Tabel IV.30. Distribusi Frekuensi Penyusunan Laporan Keuangan Sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah	57
Tabel IV.31. Distribusi Frekuensi Laporan Keuangan Menyediakan Informasi	57
Tabel IV.32. Distribusi Frekuensi Laporan Keuangan Mampu Memprediksi Masa Datang	58
Tabel IV.33. Distribusi Frekuensi Penerbitan Laporan Keuangan Tepat Waktu	59
Tabel IV.34. Distribusi Frekuensi Laporan Keuangan Harus Lengkap.....	59
Tabel IV.35. Distribusi Frekuensi Laporan Keuangan Jujur dan Transparansi	60
Tabel IV.36. Distribusi Frekuensi Laporan Keuangan Bebas dari Pengertian yang Menyesatkan dan Kesalahan	60
Tabel IV.37. Distribusi Frekuensi Informasi Laporan Keuangan Memenuhi Kebutuhan Pengguna.....	61
Tabel IV.38. Distribusi Frekuensi Informasi Laporan Keuangan Tidak Berpihak pada Kepentingan Tertentu.....	62
Tabel IV.39. Distribusi Frekuensi Informasi Harus Diuji Kebenarannya.....	62
Tabel IV.40. Distribusi Frekuensi Informasi Laporan Keuangan Jelas	63

Tabel IV.41. Distribusi Frekuensi Informasi Laporan Keuangan Sesuai dengan Pemahaman Pengguna	63
Tabel IV.42. Distribusi Frekuensi Laporan Keuangan Disusun Secara Sistematis.....	64
Tabel IV.43. Distribusi Frekuensi Informasi Laporan Keuangan Dapat Dibandingkan dengan Periode Sebelumnya	65
Tabel IV.44. Distribusi Frekuensi Kebijakan Akuntansi	65
Tabel IV.45. Distribusi Frekuensi Kebijakan Akuntansi Sama dari Tahun Ke Tahun.....	66
Tabel IV. 46. Uji Regresi Linier Sederhana.....	67
Tabel IV.47. Uji Koefisien Determinasi	68

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar II.1 Kerangka Pemikiran	23
Gambar IV.1 Struktur Organisasi Sekretariat KPU Kota Palembang.....	33

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perubahan sistem penyelenggaraan pemerintah dari sentralisasi ke desentralisasi mendorong diberlakukannya otonomi daerah. Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Berlakunya otonomi daerah maka pengelolaan keuangan sepenuhnya berada di pemerintah daerah. Pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah dituntut untuk tertib, transparan, dan akuntabel guna mewujudkan pemerintahan yang bersih. Salah satu upaya mewujudkan pemerintahan yang bersih maka pemerintah daerah diwajibkan untuk menyusun laporan keuangan.

Laporan keuangan adalah produk yang dihasilkan oleh disiplin ilmu akuntansi sehingga untuk menghasilkan laporan keuangan diperlukan orang-orang yang berkompeten. Kompetensi sumber daya manusia sangat diperlukan agar laporan keuangan yang dihasilkan dapat memenuhi karakteristik kualitatif laporan keuangan sehingga laporan keuangan yang dihasilkan dapat berkualitas dan bermanfaat dalam hal pengambilan keputusan (Wati, dkk., 2014: 2). Hal ini berbeda dengan pendapat menurut Munasyir (2015: 23) menyatakan bahwa laporan keuangan adalah bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara/daerah selama suatu periode.

Kualitas laporan keuangan penting karena salah satu bentuk tata kelola pemerintahan yang baik. Laporan keuangan yang berkualitas dapat memberikan manfaat dalam upaya mengambil kebijakan suatu pemerintahan di masa yang akan datang. Apabila laporan keuangan sudah dapat memberikan manfaat dalam membuat keputusan maka dapat mendorong percepatan pembangunan dan pengentasan kemiskinan. Laporan keuangan berkualitas suatu lembaga atau instansi pemerintah dapat dilihat dari opini yang dikeluarkan dari hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) selaku auditor pemerintah menilai Kualitas laporan keuangan pemerintah daerah setiap tahunnya. Badan pemeriksa keuangan dapat memberikan empat jenis opini terhadap laporan pertanggungjawaban yang disajikan oleh pemerintah, yaitu Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) termasuk Wajar Tanpa Pengecualian dengan Paragraf Penjelasan (WTP-DPP), Wajar Dengan Pengecualian (WDP), Tidak Wajar (TW) dan Tidak Memberikan Pendapat (TMP) (Nurhasanah, dkk., 2018: 106). Selain opini dari Badan Pemeriksa Keuangan, kualitas laporan keuangan dapat dilihat juga apabila telah disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), disusun melalui sistem akuntansi pemerintah daerah, informasi keuangan tidak terdapat penyimpangan dari peraturan perundang-undangan, dan disajikan secara tepat waktu sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Untuk memperoleh opini WTP dari BPK, laporan keuangan harus melalui beberapa proses diantaranya sesuai reputasi pemerintah, instansi

bersangkutan, sistem pengendalian keuangan yang baik, transparansi dan sebagainya. Selain itu, syarat utama tercapainya opini wajar tanpa pengecualian terhadap Laporan Keuangan Pemerintah adalah keterbukaan dalam menyajikan dan mengungkapkan seluruh transaksi keuangan yang dilakukan dan seluruh kekayaan yang dikuasai pemerintah oleh daerah tersebut. Keterbukaan tersebut perlu didukung dengan bukti- bukti yang relevan dan valid sehingga dapat ditelusuri serta diuji oleh BPK. Oleh karenanya agar Laporan Keuangan Pemerintah Dearah dapat mencapai opini WTP, biasanya BPK akan meminta adanya wujud komitmen perbaikan serta tata kelola keuangan secara nyata dan terarah.

Guna mewujudkan terciptanya opini WTP suatu lembaga pemerintah atau instansi pemerintah untuk menghasilkan laporan keuangan berkualitas harus disusun sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 dan Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan menjelaskan bahwa laporan keuangan akan berkualitas apabila memenuhi karakteristik yang terdiri dari: 1) relevan, 2) andal, 3) dapat dibandingkan dan 4) dapat dipahami. Laporan keuangan dikatakan relevan apabila informasi yang termuat didalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu melakukan evaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini dan masa depan; Andal apabila bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi; Dapat dibandingkan dengan 4 laporan keuangan periode sebelumnya dan dapat dipahami oleh penggunanya.

Fenomena yang terjadi dalam laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas laporan keuangan Komisi Pemilihan Umum Kota Palembang Tahun 2017 mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) sesuai dengan opini BPK Nomor : 24c/HP/XIV/05/2017 namun pada tahun 2018 BPK melakukan audit secara sampling kepada KPU Kota Palembang namun nilai kinerja terhadap serapan dan laporan keuangan KPU Kota tidak diberikan opini, namun BPK mengeluarkan opini terhadap KPU secara keseluruhan. Nilai hasil opini audit BPK atas laporan keuangan KPU RI tahun 2018 dinyatakan masih mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) (Lakip KPU Kota Palembang Tahun 2018, www.kota-palembang.kpu.go.id).

Opini Wajar dengan pengecualian (WDP) adalah opini audit yang diterbitkan oleh BPK jika sebagian besar informasi dalam laporan keuangan bebas dari salah saji material, kecuali untuk rekening atau item tertentu yang menjadi pengecualian (www.kpu.go.id). Sebagian akuntan memberikan julukan *little adverse* (ketidakwajaran yang kecil) terhadap opini jenis ini, untuk menunjukkan adanya ketidakwajaran dalam item tertentu, namun demikian ketidakwajaran tersebut tidak mempengaruhi kewajaran laporan keuangan secara keseluruhan. Hal yang menjadi Pengecualian terhadap opini temuan pemeriksaan BPK atas laporan keuangan Komisi Pemilihan Umum secara garis besarnya, yaitu : 1) rekonsiliasi barang milik negara dalam rangka penyusunan laporan keuangan tidak dilakukan; 2) Pencatatan dan pelaporan bagian lancar tagihan tuntutan perbendaharaan/ tuntutan ganti rugi dan piutang

tagihan tuntutan perbendaharaan/tuntutan ganti rugi belum memadai; 3) proses penetapan atas penyelesaian ganti kerugian negara tidak sesuai ketentuan; 4) pencatatan barang persediaan pada lima satker dan pembebanan belanja barang persediaan pada empat satker belum tertib; dan 5) pencatatan dan pelaporan hibah tidak memadai.

Berdasarkan fenomena di atas, menunjukkan bahwa sekretariat KPU Kota Palembang masih belum bisa untuk mengimplementasikan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) secara memadai. Sehingga kualitas laporan keuangan masih jauh dari harapan pemerintah daerah dan masyarakat, motivasi tersebut menjadi topik yang menarik untuk diteliti. Dari uraian tersebut, maka peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul “**Analisis Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Palembang**”.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimanakah penerapan standar akuntansi pemerintah terhadap kualitas laporan keuangan pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Palembang?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan standar akuntansi pemerintah terhadap kualitas laporan keuangan pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Palembang.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan telah memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Bagi Penulis

Sebagai bukti empiris yang ada tentang penerapan sistem akuntansi pemerintah terhadap kualitas laporan keuangan pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Palembang.

2. Bagi Instansi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan ajuan seberapa pentingnya sistem akuntansi pemerintah pada laporan keuangan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Palembang.

3. Bagi Almamater

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi tambahan, menambah ilmu pengetahuan terutama pada bidang akuntansi sektor publik.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi. 2013. Manajemen Penelitian. Jakarta: Rineka Cipta.
- Erlina dan Rasdianto. 2013. Akuntansi Keuangan Daerah Berbasis Akrua. Medan: Brama Ardian.
- Kesumawati Nila dan Ichwan Aridanu. 2017. Statistik Parametrik Penelitian Pendidikan. Palembang: Noer Fikri.
- Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. 2018. Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2018. (online) (<https://kpu.go.id> diakses, 10 Juni 2019)
- Munasyir. 2015. Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Aceh Utara. Jurnal Magister Akuntansi Vol 4 No 4 November 2015. ISSN: 23020164, pp. 23-35.
- Nurani H, Heni dan Euis Eti Sumiyati. 2014. Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Survey pada Pemerintahan Daerah di Jawa Barat). Proceedings. Seminar Nasional Ekonomi dan Bisnis (SNEB) 2014. Page : 1-6.
- Nurhasanah, Firmasnyah dan Kurnia Sari. 2018. Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Pengendalian Internal dan Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Jurnal Akuntanika, Vol. 4, No. 1, Januari – Juni 2018. ISSN : 2407-1072, hlm. 105-121.
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua Pada Pemerintah Daerah.
- Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No 1 Tahun 2015 tentang Penyajian Laporan keuangan.
- Rahmawati, Aska, I Wayan Mustika dan Lilik Handaya Eka. 2018. Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Sistem Pengendalian Intern terhadap Kualitas Laporan Keuangan SKPD Kota Tangerang Selatan. Jurnal Ekonomi, Bisnis, dan Akuntansi (JEBA). Volume 20 Nomor 2 Tahun 2018, pp. 8-17.

73

74

- Ridwan. 2013. Belajar Mudah Penelitian untuk Guru-Karyawan dan Peneliti Pemula. Bandung: Refika Aditama.
- Sako, Umar dan Felmi D. Lantowa. 2018. Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan terhadap Kualitas Penyajian Laporan Keuangan Pada Pemerintah Kabupaten Gorontalo. *Jurnal Of Accounting Science* Vol. 2 No. 1 EISSN 2548-3501, pp. 43-53.
- Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Palembang. 2018. Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2018. (online) (<https://kotapalembang.kpu.go.id>, diakses, 10 Juni 2019)
- Sekaran, Uma dan Roger Buogie. 2017. Metode Penelitian untuk Bisnis Pendekatan Pengembangan Keahlian. Jakarta: Selemba Empat.
- Sugiyono. 2015. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Penerbit : Alfabeta, Bandung.
- Susilawati & D.S. Riana 2014. Standar Akuntansi Pemerintahan dan Sistem Pengendalian Intern Sebagai Antecedent Kualitas Laporan Keuangan SKPD di Daerah. *Jurnal STAR-Study & Accounting Research*, XI (1),: 1693-4482.
- Yadiati, Winwin dan Abdullah Mubarak. 2017. Kualitas Pelaporan Keuangan. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Wati, Kadek Desiana, Nyoman Trisna Herawati dan Ni Kadek Sinarwati. 2014. Pengaruh Kompetensi SDM, Penerapan SAP, dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah. *Jurnal Jurusan Akuntansi Program S1*. Volume 2 No: 1 Tahun 2014, hlm 1-11.